

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2016 - 2018)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Faris Azkarafi Priady

No. Mahasiswa: 16312026

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI
PEMODERASI
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2016 - 2018)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika.

Oleh:

Nama: Faris Azkarafi Priady

No. Mahasiswa: 16312026

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

--

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Mei 2020
Penulis,



(Faris Azkarafi Priady)

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2016 - 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Faris Azkarafi Priady

No. Mahasiswa: 16312026

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 14 MEI 2020

Dosen Pembimbing,



acc ujian

(Ataina Hidayati, Dra., M.si., Ph.D., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI**

Disusun Oleh : **FARIS AZKARAFI PRIADY**
Nomor Mahasiswa : **16312026**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 15 Juni 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Ataina Hudoyati, Dra., Ak., M.Si., Ph.D.**

Penguji : **Arif Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.**



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Irka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

Allah SWT atas segala nikmat-Nya, selalu memberikan kelancaran dan kekuatan dalam segala hal yang sudah dilalui dalam hidup ini,

Ayah dan Mamah tercinta,

Bambang Supriadi dan Lena Mantofani,

Atas segala cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah putus yang selalu menyertai dalam menjalani keseharian dan untuk masa depan kelak.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Agung junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Penelitian ini berjudul “PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI PEMODERASI” disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya doa, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kelancaran, kemudahan, dan kekuatan kepada hamba-Nya setiap waktu untuk menjalani aktivitas kesehariannya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi Suri Tauladan penulis dalam menjalankan aktivitas agar selalu taat menjadi umat Islam yang bertaqwa.
3. Kedua orang tua penulis, Bambang Supriadi dan Lena Mantofani, yang sudah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan doa yang terbaik bagi penulis, sehingga penulis dapat mencapai titik ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.

Semoga di masa depan penulis dapat mencapai kesuksesan yang lebih baik dan dapat menjadi anak yang membanggakan. Aamiin.

4. Farrel Edgarrafi dan Fausta Evanrafi selaku adik dari penulis, Terima kasih atas doa yang selalu mengiringi penulis, semoga kelak bisa lebih sukses dari penulis. Aamiin.
5. Ibu Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berbagi ilmu dan memberikan pelajaran selama proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FBE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
8. Reiga Farah Amalia, teman terdekat penulis. Terima kasih atas segala waktu, kebaikan, dan segala warna-warni dalam kehidupan selama di kampus. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kebahagiaan dan kesedihan yang penulis alami. Terima kasih sudah menjadi *support system* dan *moodbooster* penulis dalam menyelesaikan studi kampus. Terima kasih atas segala doa yang sudah diberikan, dan ilmu yang bermanfaat yang sudah dibagi untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi bagian dari motivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, semoga masing-

masing dari kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan dan bisa sukses bersama. Aamiin.

9. Tim Anak Manusia. Arel Marellamahsa Fervibyuntasio, Nafisatul Ummah Oktarini, Atidira Darmesti, Wardina Marshufah Fauzan Alyafi'i, dan Aftari Nugrahaeni, selaku sahabat terdekat penulis selama menjalani kehidupan di kampus. Terima kasih sudah menjadi orang-orang yang pertama bisa menerima keberadaan penulis dan membuat kehidupan penulis menjadi lebih berwarna. Terima kasih atas keceriaan dan kekompakan dalam belajar, atas segala ilmu yang sudah dibagikan selama belajar bersama, dan waktu yang sudah dihabiskan bersama.
10. Rafiq Maulana, Mohammad Naufal, dan Raden Doan Satria Dwi Putra, sahabat penulis dan juga melengkapi keberadaan Anak Manusia, Terima kasih atas segala keceriaan, segala keseruan, hiruk pikuk, kebahagiaan dan kesedihan selama menjalani kehidupan kampus.
11. Fony Fondasiana, selaku teman terdekat dari sahabat saya Arel. Terima kasih sudah mau memberikan warna pada kehidupan pertemanan saya, atas segala waktu dan bantuannya, dan ilmu yang sudah dibagikan kepada penulis.
12. Grup 'Mabarsek'. Asa, Ifan, Edo, Fafa, Hafiz, dan Leo, selaku sahabat penulis di Sewon Tercinta, Terima kasih sudah banyak menghabiskan waktu bersama hanya untuk berbagi kebahagiaan, entah apa yang dilakukan, semoga selalu menjadi yang terkompak di perumahan Puri Sewon Asri.

13. Hisyam Alfaruqi Hilmi, Ahmad Naufal Bahy, dan Diah Arum, selaku sahabat penulis, Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk berbagi kesenangan ketika bermain bersama.
14. Tim Nggaplek (Generasi Penerus Bangsa). Abid, Afan, Eka, Edo, Fida, Farhan, dan Sultan, selaku sahabat penulis sejak SMA, dan juga seluruh teman-teman SMAIT Abu Bakar angkatan 2016, Terima kasih sudah menjadi bagian memori terbaik selama sekolah dan waktu yang selalu dihabiskan meskipun sudah lulus SMA.
15. Keluarga KKN Unit 10 Angkatan ke-59. Jalil, Rifdan, Zibda, Devi, Fidel, Dela, dan Arum. Terima kasih untuk waktu yang cukup singkat untuk saling mengenal, berjuang bersama, melewati suka dan duka bersama. Satu bulan sangat tidak terasa, semoga bisa dipertemukan kembali ketika sukses kelak.
16. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2016 yang sudah menjadi keluarga baru bagi penulis, sudah melewati perjuangan belajar bersama, semoga diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan diberikan kesuksesan dan jalan yang terbaik.

Penulis mengucapkan banyak Terima kasih kepada seluruh pihak yang juga tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang sudah banyak membantu dan mendukung penulis hingga sampai titik ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan

penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Mei 2020

Penulis,



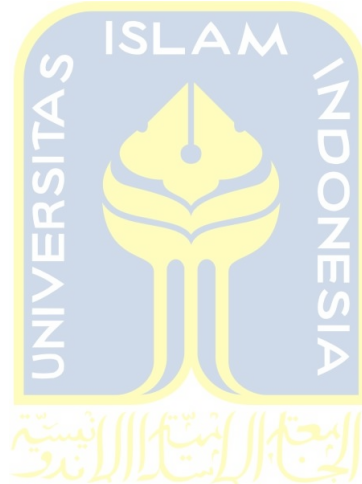
Faris Azkarafi Priady

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	10
2.1.2 <i>Political Favoritism Effect</i>	11
2.1.3 Pajak	11
2.1.4 Penghindaran Pajak	12
2.1.5 Koneksi Politik.....	13
2.1.6 Corporate Governance	13
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian	26
2.3.1 Hubungan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.....	26
2.3.2 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.....	27
2.3.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.....	27
2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional memoderasi Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.....	28
2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial memoderasi Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	32
3.3.1 Variabel Dependen	32
3.3.2 Variabel Independen	33
3.3.3 Variabel Pemoderasi	34
3.3.3.1 Corporate Governance	34
3.3.3.1.1 Kepemilikan Institusional	34
3.3.3.1.2 Kepemilikan Manajerial	34
3.4 Metode Analisis Data	35
3.4.1 Statistik Deskriptif	35
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	35
3.4.2.1 Uji Normalitas	35
3.4.2.2 Uji Autokorelasi	36
3.4.2.3 Uji Multikolinearitas	36
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas	36
3.5 Pengujian Hipotesis	36
3.5.1 Analisis Regresi Berganda	36
3.5.2 Uji F	37
3.5.3 Uji Koefisien Determinan	38
3.5.4 Uji T	38
BAB IV	40
HASIL DAN ANALISIS	40
4.1 Hasil Pengumpulan Data	40
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	41
4.3 Uji Asumsi Klasik	43
4.3.1 Uji Normalitas	43
4.3.2 Uji Autokorelasi	43
4.3.3 Uji Multikolinearitas	45
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	45
4.4. Uji Analisis Regresi Berganda	46
4.5 Uji Hipotesis	49
4.5.1 Uji F	49
4.5.2 Uji t	49
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	51

4.6.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	51
4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	52
4.6.3 Pengaruh kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak	53
4.6.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak	53
4.6.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak	54
BAB V	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Keterbatasan Penelitian	56
5.3 Saran Penelitian	57

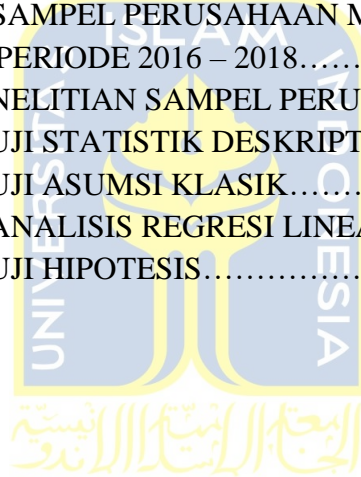


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Kajian Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Berdasarkan Metode <i>purposive sampling</i> ..	41
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji F.....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016 – 2018.....	65
Lampiran 2 DATA PENELITIAN SAMPEL PERUSAHAAN.....	67
Lampiran 3 OUTPUT UJI STATISTIK DESKRIPTIF.....	72
Lampiran 4 OUTPUT UJI ASUMSI KLASIK.....	73
Lampiran 5 OUTPUT ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA.....	75
Lampiran 6 OUTPUT UJI HIPOTESIS.....	76



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of political connection on tax avoidance with corporate governance as a moderating variabel. Corporate governance is proxied by Institutional ownership and managerial ownership. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2016 - 2018 period. The number of samples taken as many as 58 companies with purposive sampling methods. The data analysis technique used is multiple linear regression. The result of this study indicates that the political connection has no effect on tax avoidance, the institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance, the managerial ownership has no effect on tax avoidance, the institutional ownership moderate political connection has no effect on tax avoidance, and the managerial ownership moderate political connection has no effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, political connection, corporate governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. *Corporate governance* diproksikan menjadi variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 - 2018. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 58 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional memoderasi koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan manajerial memoderasi koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, koneksi politik, *corporate governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dalam melakukan pembangunan infrastruktur berskala besar, pemerintah memerlukan dana yang besar pula. Dana besar yang digunakan pemerintah berasal dari berbagai sumber yang sudah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rata-rata realisasi kontribusi penerimaan pajak hingga tahun 2018 sebesar 84.26%, yang mana penerimaan pajak adalah pendapatan negara terbesar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga infrastruktur Negara Indonesia.

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena unsur pajak yang memang bersifat memaksa, maka tidak dipungkiri bahwa kinerja Negara dalam memungut pajak selalu menghadapi halangan, yang mana menurut data APBN yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa penerimaan pajak pada tahun

2018 dan 2019 tidak dapat memenuhi anggaran. Tercatat bahwa pada tahun 2019, negara Indonesia hanya mampu menerima pendapatan pajak sebesar Rp1.545,3 triliun, atau 86,5% dari target APBN tahun 2019.

Faktor-faktor yang memungkinkan menjadi penyebab mengapa penerimaan pajak Negara mengalami penghambatan yaitu: target APBN yang terlalu tinggi, ketidak-taatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya secara jujur, dan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia (Asadine & Venusita, 2020). Penghindaran pajak sendiri adalah aktivitas dimana sebuah perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan, sehingga mereka dapat meminimalisir biaya pajak yang mereka keluarkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan unsur penting bagi pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Namun disisi lain, wajib pajak terutama sebuah perusahaan ingin membayar pajak sekecil-kecilnya, karena dengan mereka membayar pajak, maka keuntungan yang mereka dapatkan akan berkurang, maka dari itu tak heran jika beberapa perusahaan selalu mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut. Penghindaran pajak dapat menjadi tindakan ilegal yaitu penggelapan pajak, jika sebuah perusahaan melakukannya dengan tidak memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku (Darmayanti & Merkusyawati, 2019).

Untuk mengukur kinerja pemerintah dalam memungut pajak, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Lestari et al., 2019).

Pakar Ekonomi Senior, Faisal Basri, menyatakan bahwa *tax ratio* pada tahun 2019 adalah angka yang terendah dalam 50 tahun terakhir. Faisal Basri menyayangkan mengenai *tax ratio* yang uturn menjadi 8,9 persen dari PDB. Menurutnya, angka ini lebih rendah dari target pajak yang dijanjikan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, yaitu mencapai 11,4 sampai 11,9 persen dari PDB. Faisal Basri melanjutkan bahwa dengan rendahnya *tax ratio* ini, seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk membenahi regulasi perpajakan yang berlaku (Pebrianto & Tri, 2020).

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang pernah menjadi sorotan publik Internasional adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan raksasa di sektor peralatan rumah tangga asal Swedia, yaitu IKEA. Dilaporkan bahwa IKEA telah melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar selama lima tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA menghindari pajak dengan cara memindahkan labanya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi, ke anak perusahaannya yang berdomisili di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Selain itu, IKEA juga membebaskan biaya royalti dari perusahaan satu ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama, agar pajak yang mereka tanggung dapat berkurang. Kemudian pada tahun 2014, IKEA dilaporkan melakukan penghindaran pajak sebesar 13 juta dolar di Inggris, 26 juta dolar di Prancis, dan 39 juta dolar di Jerman. Karena itu Uni Eropa mengalami kerugian hingga puluhan miliar dolar per tahunnya (Forum Pajak, 2016).

Kemudian, kasus penghindaran pajak yang ramai diperbincangkan dalam negeri baru-baru ini ada pada PT. Adaro Energy Tbk, perusahaan raksasa batubara dalam negeri. Global Witness, Lembaga Swadaya Masyarakat berskala internasional melaporkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Yustinus Prastowo sebagai pengamat perpajakan, menyatakan pada Detik Finance bahwa PT. Adaro Energy Tbk. memanfaatkan celah dengan menjual batubaranya ke anak perusahaannya tersebut dengan harga lebih rendah. Kemudian, batubara tersebut dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Maka dari itu, PT. Adaro Energy Tbk. hanya membayar pajak yang lebih rendah di dalam negeri. Karena aktivitas yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. tersebut dapat menyebabkan negara Indonesia mengalami kerugian yang besar (Sugianto, 2019).

Penelitian tentang penghindaran pajak sudah banyak dilakukan. Dari beberapa penelitian tersebut, disebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan hasil yang konsisten yaitu adalah profitabilitas yang mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hasil ini dinyatakan oleh Annisa (2017); Darmayanti & Merkusiwati (2019); Fadila (2017); Windaswari & Merkusiwati (2018), dan Utari & Supadmi (2017). Sementara itu, beberapa faktor yang belum memiliki hasil yang konsisten adalah faktor koneksi politik, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Penelitian tentang penghindaran pajak yang berkaitan tentang koneksi politik memiliki hasil yang berbeda-beda. Mulyani et al. (2014) dalam jurnalnya menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian, Ayu et al. (2017); Darmayanti & Merkusyawati (2019); Fadila (2017) menyatakan dalam jurnalnya bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan disisi lain, Utari & Supadmi (2017) mempunyai hasil bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif yang menyebabkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional menurut Dewi & Sari (2015) dan Rejeki et al. (2019) dalam jurnalnya tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian, Charisma & Dwimulyani (2019) dan Dini (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan disisi lain, Putri & Lawita (2019) menyatakan dalam jurnalnya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam kepemilikan manajerial, menurut Charisma & Dwimulyani, (2019) dan Pramudito & Sari (2015) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mana faktor ini dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Namun, Dini (2019) dan Rejeki et al. (2019) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan disisi lain, Putri & Lawita (2019) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang mana artinya bahwa semakin besarnya

kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan kecenderungan perusahaan tersebut dalam melakukan penghindaran pajak.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti akan menambahkan faktor kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi, guna mencari tahu apakah kedua faktor tersebut dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak. Maka dari itu, adanya inkonsistensi dari faktor-faktor yang sudah disebutkan, peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi”** dengan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan khususnya bagi penulis terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan

khususnya dibidang ekonomi akuntansi perpajakan, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penghindaran pajak, koneksi politik, dan *corporate governance*.

2. Manfaat secara praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah dalam membuat penegasan dalam regulasi perpajakan agar perusahaan diluar sana tidak dapat mencari celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan perekonomian negara, dan juga dapat digunakan perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan pada penelitian ini disajikan dalam lima bab yang akan disusun secara sistematis sehingga akan menggambarkan hubungan antar bab dengan bab lainnya:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

- **Bab III Metode Penelitian**

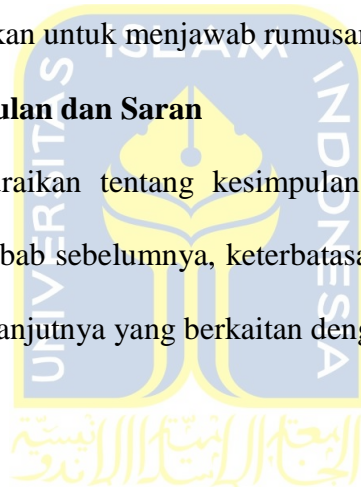
Bab ini berisi tentang populasi dan sampel penelitian yang digunakan, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian serta definisinya, dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

- **Bab IV Hasil dan Analisis**

Bab ini menguraikan tentang perhitungan analisis data yang diteliti, pengujian hipotesis serta hasil pengujian tersebut. Hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

- **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang landasan teori, pengertian tentang penghindaran pajak, koneksi politik, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Kemudian, penulis akan memaparkan telaah penelitian terdahulu yang terkait untuk mendukung referensi dan mengembangkan hipotesis serta kerangka penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori Agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kontrak antara pemberi wewenang dan agen sebagai pelaksana wewenang atau manajer dalam perusahaan. Hubungan keagenan ini adalah sebuah kontrak dari satu atau beberapa pemberi wewenang yang memberikan pekerjaan kepada agen untuk melaksanakan beberapa jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Teori ini juga dapat menjelaskan tentang *agency problem*, yaitu pertentangan perbedaan kepentingan antara agen (manajemen atau pemegang saham) dengan pemberi wewenang sebagai pemilik perusahaan atau institusi, karena kepentingan antara pemberi wewenang sebagai pemilik dengan agen terkadang tidak selalu sejalan atau satu tujuan (Idzni & Purwanto, 2017).

Agen atau manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan harus memiliki tujuan yang sejalan dengan keinginan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018). Akan tetapi, karena adanya *agency*

problem tersebut, muncul asimetri informasi antara agen atau manajer dengan prinsipal sebagai pemilik perusahaan dikarenakan manajer lebih mengetahui tentang informasi yang bersifat internal tentang perusahaan yang dikelola dibandingkan prinsipalnya (Handayani, 2018). Hal ini bisa terjadi salah satu contohnya ketika agen memanfaatkan pendelegasian wewenang yang dia salah gunakan untuk merubah suatu kebijakan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak, agar keuntungan perusahaan bisa maksimal dan memberikan citra baik kepada agen.

2.1.2 Political Favoritism Effect

Jian et al. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak di negara China. Perusahaan yang memiliki koneksi politik di China sering kali meminta bantuan kepada Pemerintah China, termasuk melobi badan perpajakan di China, seperti menghindari pemeriksaan pajak, meminimalisir sanksi atau denda, atau tindakan lain yang tergolong penghindaran pajak yang melanggar hukum atau bersifat ilegal. Hal-hal seperti ini disebut dengan *political favoritism effect*, dimana koneksi politik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Teori ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fisman (2001) yang menyatakan bahwa koneksi politik memiliki peran penting dalam perekonomian negara berkembang dengan perlindungan hak milik lemah, dan salah satunya di Indonesia.

2.1.3 Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang tertinggi dibandingkan pendapatan negara lainnya. Pengertian pajak dalam UU no. 28 tahun 2007 yaitu

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Windaswari & Merkusiwati (2018), target penerimaan pajak selama 2012-2016 adalah yang tertinggi, hingga mencapai 94.4%. Bagi negara, pajak sangat penting untuk pertumbuhan negara dalam mengembangkan infrastruktur, perekonomian, dan lain sebagainya.

Hal ini sangat bertentangan dengan perusahaan bisnis yang menganggap bahwa pajak adalah beban, yang mana dapat mengurangi laba. Maka dari itu, banyak perusahaan yang menjadi agresif dalam melakukan penghindaran pajak agar laba perusahaan mereka tetap maksimal (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah segala usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam memanfaatkan celah-celah dari peraturan pajak, dengan cara yang legal atau diperbolehkan, dengan tujuan yaitu meminimalkan pendapatan perusahaan dari sudut pandang perpajakan yang mengakibatkan beban pajak menurun. Cara-cara seperti ini memang sudah wajar dilakukan perusahaan besar di Indonesia, karena pajak adalah salah satu unsur pengurang pendapatan yang terbesar, maka dari itu mereka ingin meningkatkan keuntungan mereka. Aktivitas penghindaran pajak ini tidak disukai oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, karena di lain sisi, pajak adalah kontribusi kepada negara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Akan tetapi, aktivitas ini bersifat legal karena hanya memanfaatkan celah-celah dari aturan perpajakan tersebut dan tidak

melebihi batas-batas dari aturan tersebut. Jadi, ketika ada perusahaan yang melakukannya, tidak akan diberikan hukuman atau sanksi karena legalitasnya itu (Utari & Supadmi, 2017).

2.1.5 Koneksi Politik

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapatkan berbagai keuntungan dan akibat negatif. Keuntungan untuk perusahaan yang terkoneksi politik yaitu adanya hak-hak istimewa yang akan diberikan jika perusahaan mengalami kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik ketika sebagian besar saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah, dengan minimal kepemilikan 25 persen, sesuai dengan pasal 18 UU No 36 tahun 2008 tentang hubungan istimewa (Lestari & Putri, 2017). Manfaat lain dari perusahaan yang terkoneksi politik yaitu mendapatkan keringanan dalam hal perpajakan, yaitu dapat terhindar dari audit pajak (Pranoto & Widagdo, 2016). Akibat negatifnya, perusahaan yang terkoneksi politik oleh pemerintah, akan mendapatkan tekanan oleh pemerintah, karena pemerintah akan menuntut kinerja perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi pemerintah dengan menekan pajak yang terutang (Dharma & Ardiana, 2016).

2.1.6 Corporate Governance

2.1.6.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang ditanamkan atas nama institusi seperti Perseroan Terbatas, Lembaga Asuransi, Bank, dan lain-lain (Sandy & Lukviarman, 2015). Ketika sebagian saham perusahaan dipegang oleh institusi lain, akan berpengaruh terhadap pengawasan

kinerja perusahaan tersebut. Hal itu dikarenakan, institusi yang menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, akan menilai seberapa baik pengembalian atas investasinya tersebut. Maka dari itu, sebagai pemegang saham, sebuah institusi juga akan menuntut perusahaan tersebut untuk meningkatkan kinerjanya sebagaimana mestinya.

2.1.6.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Kusumayani & Suardana (2017), kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (komisaris atau direktur). Kepemilikan manajerial diyakini dapat menjembatani hubungan antara pihak prinsipal dan agen yang menjalankan operasional, sehingga pihak prinsipal dapat meminimalisir *agency problem* yang dapat terjadi.

Perusahaan yang sebagian kepemilikan sahamnya dimiliki oleh manajer, akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikan sahamnya tidak terdapat kepemilikan manajerial. Hal itu disebabkan karena, manajer atau eksekutif yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut secara tidak langsung juga bertindak sebagai prinsipal atau pemilik perusahaan. Maka dari itu, manajer yang bertindak sebagai prinsipal atau pemilik juga akan menyelaraskan tujuan pribadinya dengan tujuan perusahaan (Christiawan & Tarigan, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait penghindaran pajak, koneksi politik, dan *corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2014) ini bertujuan untuk mencari tahu apa pengaruh dari karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yang menggunakan variabel leverage dan intensitas modal berbeda hasilnya. Ketika *leverage* menghasilkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, tidak berlaku kepada intensitas modal yang tidak mempunyai pengaruh apapun. Selanjutnya, Koneksi politik mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa jika *leverage* meningkat maka penghindaran pajak turun atau dapat dikatakan tarif pajak efektifnya naik.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fadila (2017). Peneliti bertujuan untuk mencari tahu pengaruh dari variabel independennya yaitu return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana leverage dan koneksi politik tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa ketika perusahaan memiliki ROA yang tinggi karena dapat mengelola asetnya dengan baik, dan mendapatkan *return* yang tinggi pula, maka perusahaan cenderung untuk menurunkan biaya yang mana salah satunya pajak, agar keuntungan perusahaan yang didapat juga besar. Sama halnya dengan kepemilikan

institusional, karena adanya campur tangan kepemilikan oleh institusi lain, maka perusahaan akan mendapatkan tekanan dari institusi lain tersebut untuk meningkatkan laba, agar institusi lain yang mempunyai saham di sebuah perusahaan tersebut dapat mendapatkan *return* yang besar dari investasinya tersebut.

Lestari & Putri (2017) melakukan penelitian tentang Penghindaran Pajak. Variabel Dependennya adalah *cash effective tax rate* yang diprosikan untuk penghindaran pajak. Sedangkan variabel independennya adalah *corporate governance*, koneksi politik, dan *leverage*. Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jika CG diterapkan dengan baik, maka tingkat penghindaran pajak akan turun yang ditunjukkan dengan CETR yang tinggi. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena peneliti juga menyebutkan jika eksekutif perusahaan adalah orang pemerintahan, maka dia juga akan menjaga nama baik perusahaan dan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Terakhir, leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi hutang menyebabkan CETR rendah, yang menandakan semakin tingginya aktivitas penghindaran pajak.

Berikutnya, Utari & Supadmi (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan membuktikan secara empiris apa pengaruh dari variabel *corporate governance*, profitabilitas, dan koneksi politik pada penghindaran pajak yang sebagai variabel dependennya. Hasil dari penelitian ini yaitu *corporate governance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.

Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Kemudian, koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Penelitian ini menjelaskan teori bahwa ketika sebuah perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak karena adanya kepentingan dari sisi perusahaan yaitu meningkatkan laba.

Pada tahun 2019, Darmayanti & Lely Aryani Merkusiwati melakukan penelitian yang menggunakan Variabel independennya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, koneksi politik dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Tujuan adalah untuk memperoleh hasil empiris mengenai pengaruh variabel independen tersebut pada *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, koneksi politik dan pengungkapan CSR tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, yang mana berarti ketika laba yang diperoleh perusahaan besar, akan sangat berpengaruh kepada perusahaan dan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Penelitian milik Dewi & Sari yang berjudul “Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* pada *Tax Avoidance*” pada tahun 2015 membuahkan hasil yang menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Kemudian Insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*” dilakukan oleh Pramudito & Sari pada tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana semakin besar persentase kepemilikan saham oleh manajer, maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin berkurang.

Dini (2019) melakukan penelitian tentang hubungan antara *Corporate Governance* dengan penghindaran pajak dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bisa disimpulkan bahwa besarnya kepemilikan saham manajerial tidak akan membuat kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Pada tahun 2019, Charisma & Dwimulyani melakukan penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. Mereka menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajer dan

institusi, manajemen akan cenderung lebih giat dalam mementingkan kepentingan pemegang saham, dan manajemen juga menghindari pengambilan keputusan yang salah.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi” yang dilakukan oleh Sri Rejeki, Anggita Langeng Wijaya, dan Nik Amah (2019) menghasilkan penemuan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penemuan ini bertolak belakang dengan hasil sebelumnya yang disebutkan diatas. Artinya, sebesar apapun kepemilikan saham sebuah perusahaan oleh institusi dan manajemen perusahaan itu sendiri, tidak akan mendesak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak maupun menghindari agresivitas pajak.

Pada tahun yang sama pula, Putri & Lawita juga melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak”. Pada penelitian ini, mereka menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif yang signifikan, dimana artinya ketika semakin bertambahnya prosentase kepemilikan oleh institusi dan manajerial, maka semakin bertambahnya kecenderungan sebuah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Yunistina & Tahar melakukan penelitian tentang hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan Agresivitas pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi pada tahun 2017. Variabel *GCG* pada penelitian

ini menggunakan proksi variabel komisaris independen dan komite audit. Dalam penelitian ini yang dilakukan dengan sampel perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2014-2015, variabel komisaris independen dan komite audit tidak dapat memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak. Variabel GCG pada penelitian ini tidak dapat mempengaruhi hubungan CSR yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian selanjutnya berjudul Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi yang dilakukan pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2016 dilakukan oleh Vidiyanna. R. Putri pada tahun 2018. Vidiyanna R. Putri menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif yang signifikan, dimana ketika perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah, perusahaan cenderung akan menghindari agresivitas pajak. Variabel GCG sebagai pemoderasi diproksikan menjadi kepemilikan institusional, yang mana kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak.

Wardani & Juliani (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi’. Mereka mendapati hasil bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. *Corporate Governance* yang diproksikan dengan variabel kualitas audit, mampu melemahkan hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi” dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani pada tahun 2019. Dengan sampel perusahaan manufaktur non-makanan dan minuman di BEI periode 2015 - 2017, penelitian ini menemukan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara *Thin Capitalization* dan penghindaran pajak, tetapi dapat melemahkan hubungan Profitabilitas dan penghindaran pajak, yang mana artinya dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Tabel 2.1 Telaah Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Variabel Independen	Hasil Kajian
Mulyani, Darminto, Endang (2014)	Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan.	<p>Karakteristik perusahaan yang digunakan adalah <i>leverage</i> dan intensitas modal. Ketika <i>leverage</i> menghasilkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, tidak berlaku kepada intensitas modal yang tidak mempunyai pengaruh apapun.</p> <p>Koneksi politik mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

Dewi dan Sari (2015)	Insentif Eksekutif, <i>Corporate Risk</i> dan <i>Corporate Governance</i>	Corporate risk berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Kemudian Insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada <i>tax avoidance</i> . kualitas audit berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .
Pramudito dan Ratnasari (2015)	Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan Komisaris	Konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Fadila. (2016)	<i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik.	<i>Return on asset</i> mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan, Kepemilikan institusional, dan Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan penghindaran pajak. Di lain sisi koneksi politik tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penghindaran pajak.
Yunistiyani dan Tahar (2017)	<i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i>	Komisaris independen dan komite audit tidak dapat memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak. Variabel GCG pada penelitian ini tidak dapat mempengaruhi hubungan

		CSR yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
Lestari dan Putri. (2017)	<i>Corporate Governance</i> , Koneksi Politik, dan <i>Leverage</i> .	<p><i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
Utari dan Supadmi. (2017)	<i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Koneksi Politik.	<p><i>Corporate governance</i> yang diprosikan dengan proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.</p> <p>Profitabilitas yang diprosikan dengan <i>return on assets</i>(ROA) berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.</p> <p>Koneksi politik yang diprosikan dengan variabel dummy berpengaruh positif pada penghindaran pajak.</p>
Putri (2018)	Koneksi Politik, dan <i>Good Corporate Governance</i>	<p>Koneksi politik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Variabel GCG sebagai pemoderasi diprosikan menjadi kepemilikan institusional, yang mana kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan</p>

		penghindaran pajak.
Wardani dan Juliani (2018)	<i>Tax Avoidance</i> dan <i>Corporate Governance</i>	Penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. <i>Corporate Governance</i> yang diprosikan dengan variabel kualitas audit, mampu melemahkan hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
Darmayanti dan Merkusiwati. (2019)	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh negatif pada tax avoidance. Koneksi politik tidak berpengaruh pada tax avoidance. Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh pada tax avoidance
Dini (2019)	Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan kepemilikan manajerial.	Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Charisma dan Dwimulyani (2019)	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga.	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Rejeki, Wijaya, dan Amah. (2019)	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris, dan Transfer Pricing.	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Putri dan Lawita. (2019)	Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.
Dwimulyani (2019)	<i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional.	<i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara <i>Thin Capitalization</i> dan penghindaran pajak, tetapi dapat melemahkan hubungan Profitabilitas dan penghindaran pajak, yang mana artinya dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Hubungan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

Sesuai dengan teori *Political Favoritism Effect* yang menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik atau mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintahan, perusahaan tersebut akan cenderung meminta bantuan kepada pemerintahan dalam hal apapun, seperti perizinan operasional, pinjaman pendanaan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut memiliki kemungkinan untuk meminta perlindungan dalam hal perpajakan kepada pemerintahan yang dapat meringankan beban pajak atau dendanya.

Windaswari & Merkusiwati (2018) mendefinisikan bahwa perusahaan dikatakan terkoneksi politik ketika sebagian saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah atau BUMN. Jian et al., (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki 37 persen kemampuan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Maka dari itu, koneksi politik sudah menjadi bagian prioritas untuk sebagian besar perusahaan untuk memanfaatkan keuntungan tersebut.

Penelitian Utari & Supadmi (2017) menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana artinya perusahaan yang memiliki hubungan yang istimewa dengan pemerintah, cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan teori yang dikatakan sebelumnya bahwa, perusahaan yang terkoneksi politik akan memanfaatkan hubungannya untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan dari berbagai hal, termasuk dalam hal perpajakan.

H₁ : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.

Teori Agensi menjelaskan tentang perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku pemilik perusahaan dan manajer yang bertugas menjalankan operasional perusahaan. Dikarenakan manajer lebih banyak menjalankan tugas yang berhadapan langsung di perusahaan membuat manajer mempunyai lebih banyak informasi yang detail tentang segala aspek di perusahaan daripada prinsipal. Hal ini dapat membuat manajer memiliki celah untuk melakukan sesuatu kecurangan, salah satunya penghindaran pajak.

Semakin besar kepemilikan saham oleh institusional pada sebuah perusahaan, akan mengakibatkan pengawasan yang sangat ketat pada kegiatan rutinitas perusahaan (Dini, 2019). Maka dari itu, hal ini dapat mencegah manajer dalam mencari celah dalam membuat kecurangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto & Utomo (2019) dan Indira Yuni & Setiawan (2019) yang menemukan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh institusi akan mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.

Mengacu pada *Agency Theory* yang menjelaskan terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku pemilik perusahaan dengan agen atau manajer yang menjalankan operasional rutinitas di perusahaan. Maka dari itu, suatu perusahaan menerapkan kepemilikan saham oleh manajer, yang diharapkan dapat

menyelaraskan kepentingan antara manajer dan prinsipal selaku pemilik. Karena manajer juga berlaku sebagai prinsipal, maka manajer akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, termasuk mengambil celah untuk melakukan kecurangan dan salah satunya penghindaran pajak, agar kinerja perusahaan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, manajer juga akan mendapatkan *feedback* yang maksimal dari kepemilikan yang dia miliki. Ketika perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai aturan, maka perusahaan juga akan terhindar dari permasalahan salah satunya perpajakan (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Hal ini juga sejalan oleh penelitian Pramudito & Sari (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena ketika kepemilikan saham oleh manajer tinggi, maka manajer akan mengutamakan kepentingannya pula sebagai pemilik dimana dia ingin perusahaan yang dijalankan dapat beroperasi dengan baik dan maksimal. Sehingga, manajer akan berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar perusahaan dapat terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum termasuk penghindaran pajak.

H₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional memoderasi Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika salah satu pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah, dengan minimal kepemilikan 10 persen (Pranoto & Widagdo, 2016). Perusahaan yang terkoneksi politik dapat

memanfaatkan hubungannya dengan pemerintah untuk mendapatkan hak-hak istimewa, seperti pinjaman pendanaan, risiko pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat diasumsikan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dapat mencegah adanya kecenderungan perusahaan yang terkoneksi politik dapat melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena institusi yang menanamkan sahamnya pada sebuah perusahaan terkoneksi politik, tidak ingin investasinya bermasalah dengan adanya kecurangan yang dilakukan manajer dalam memanfaatkan celah yang dimiliki karena berelasi dengan pemerintah. V. R. Putri (2018) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional, maka kinerja dan kepatuhan suatu perusahaan akan meningkat.

H₄ : variabel Kepemilikan Institusional melemahkan hubungan Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak.

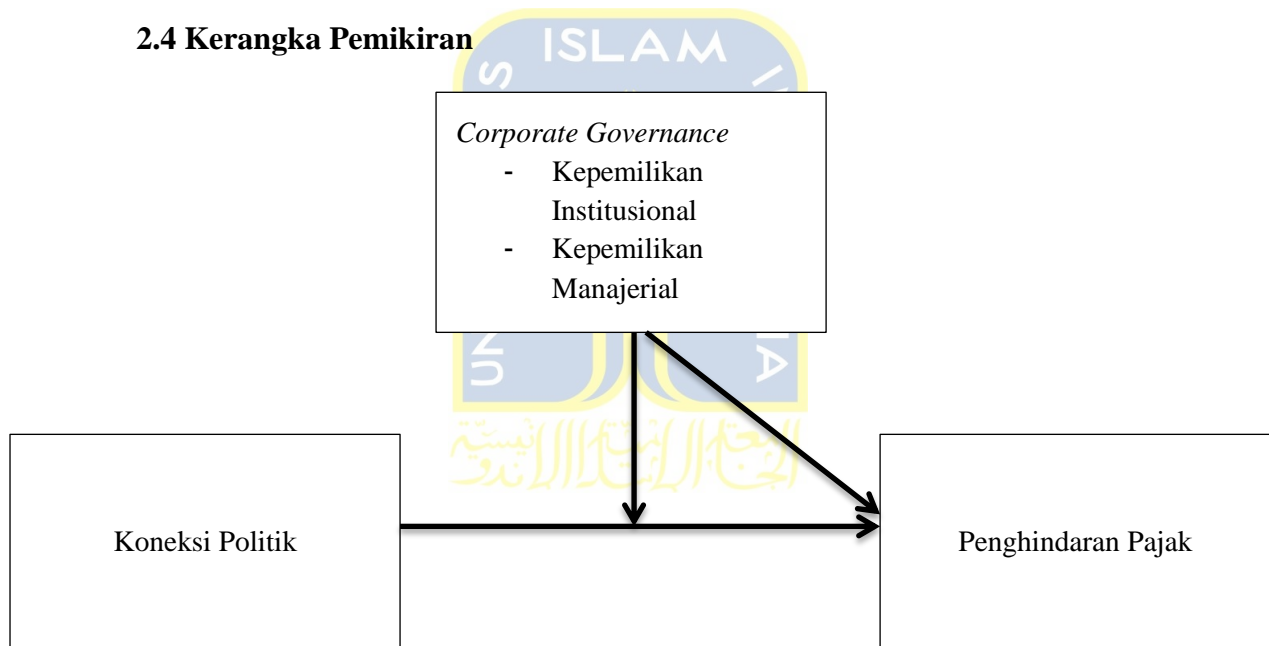
2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial memoderasi Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

Teori agensi menjelaskan tentang perbedaan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai manajemen yang menjalankan perusahaan tersebut. Agar terciptanya lingkungan pekerjaan yang baik dan sehat, prinsipal sebagai pemilik perusahaan harus bisa menyelaraskan tujuan umum perusahaan dengan apa yang ingin dicapai oleh manajemen sebagai yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Menurut Kusumayani & Suardana (2017), beberapa

perusahaan menerapkan kepemilikan saham perusahaannya oleh manajemen, yang mana dipercaya dapat menjembatani perbedaan kepentingan tersebut menjadi selaras. Maka dari itu, manajemen juga dapat bekerja dengan baik dan menaati segala peraturan demi keberlangsungan perusahaan yang berdampak langsung dengan saham yang ia miliki pada perusahaan yang ia jalankan.

H₅ : variabel Kepemilikan manajerial melemahkan hubungan Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran



Dari gambar kerangka pemikiran di atas terdapat variabel independen yaitu koneksi politik, variabel moderasi adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif adalah metode ilmiah yang telah memenuhi kaidah ilmiah yang objektif, sistematis, terukur, dan rasional. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mencari tahu tentang kondisi, keadaan, atau hal-hal yang mana hasilnya nanti disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Pranoto & Widagdo, 2016). Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun, yaitu tahun 2016 - 2018.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yang bertujuan untuk mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Beberapa kriteria sampel yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016 – 2018
2. Perusahaan Manufaktur yang tidak mengalami kerugian fiskal selama tahun 2016 – 2018, karena perusahaan yang mengalami kerugian fiskal tidak diwajibkan membayar pajak sehingga tidak relevan dengan penelitian.
3. Perusahaan Manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah.

4. Perusahaan Manufaktur yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya yang telah diaudit.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 - 2018, yang berasal dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi dan dokumentasi.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi. Dari penelitian ini, ada 3 jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel pemoderasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu usaha atau strategi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisir beban pajak sehingga laba operasional perusahaan bisa meningkat (Darmawan & Sukartha, 2014). Berdasarkan kacamata hukum, penghindaran pajak bukanlah sesuatu yang ilegal asalkan masih dalam batasan aturan perpajakan. Meskipun bersifat legal, tetapi penghindaran pajak bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah, karena

pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar (Darmawan & Sukartha, 2014).

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti & Lely Aryani Merkusiwati (2019), perhitungan untuk variabel penghindaran pajak yaitu menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) sendiri adalah rasio antara beban pajak perusahaan terhadap pendapatan perusahaan sebelum pajak penghasilan. Rasio ETR digunakan karena dapat merefleksikan perbedaan tetap antara laba buku dengan laba fiskal, dengan rumus berikut:

$$ETR = \frac{\text{Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$$

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Koneksi Politik

Kejayaan dan kesuksesan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh *stakeholder* politik suatu daerah dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik ketika sebagian besar saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah. Koneksi politik dalam penelitian ini menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung saham pada perusahaan oleh pemerintah (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

Mengacu pada penelitian Windaswari & Merkusiwati (2018), pengukuran koneksi politik pada penelitian ini menggunakan variabel dummy, diberi nilai 1 apabila pada perusahaan terdapat kepemilikan saham dari pemerintah (BUMN) dan 0 apabila tidak ada. Pada penelitian pengukuran koneksi politik pada suatu perusahaan mengacu pada penelitian G. A. W. Lestari & Putri (2017), dinilai dari adanya kepemilikan saham pemerintah minimal sebesar 25% yaitu sesuai dengan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 tentang hubungan istimewa. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengindikasikan adanya koneksi politik (G. A. W. Lestari & Putri, 2017).

3.3.3 Variabel Pemoderasi

3.3.3.1 Corporate Governance

Variabel pemoderasi pada penelitian ini adalah *Corporate Governance*, yang akan dibagi menjadi 2 proksi elemen, yaitu ada Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial.

3.3.3.1.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang ditanamkan atas nama institusi seperti Perseroan Terbatas, Lembaga Asuransi, Bank, dan lain-lain (Sandy & Lukviarman, 2015). Kepemilikan institusional pada penelitian ini, dihitung dengan mengacu pada penelitian milik Sandy & Lukviarman (2015) dan Ginting (2016), yaitu dengan rasio perbandingan antara total saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

3.3.3.1.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen sebuah perusahaan itu sendiri, yaitu Komisaris, Direksi, Manajer, dan karyawan (Maraya & Yendrawati, 2016). Kepemilikan Manajerial pada penelitian ini diukur dengan mengacu pada penelitian milik Dini (2019), yang mana dihitung

menggunakan rasio perbandingan antara total saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan jumlah saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat berdasarkan nilai modus, median, rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *range*, kurtois, dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2011).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai dasar dalam melakukan analisis regresi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan distribusi dalam model regresi pada variabel residual (Ghozali, 2011). Karena, data yang baik dan layak untuk membuktikan model penelitian harus memiliki nilai residu yang berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan *normal probability* dan plot dan Kolmogorov-smirnov dalam pengujiannya dengan ketentuan:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dikatakan berdistribusi normal
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal

3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada umumnya dilakukan dengan Pengujian Durbin-Watson (K. E. Putri et al., 2019). Dengan syarat pengambilan keputusan yaitu nilai Durbin-Watson lebih besar dari DU (nilai atas) dan lebih kecil dari 4-DU, maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

3.4.2.3 Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya gejala Multikolinieritas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Syarat pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik *Scatter plot*, antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika titik – titik pada grafik Scatterplot membentuk semacam pola tertentu yang teratur seperti melebar, bergelombang, atau menyempit, maka bisa dikatakan bahwa data terjadi heteroskedastisitas. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas.

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah metode analisis yang dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen,

apakah arahnya berhubungan positif atau negatif. Pada penelitian ini, persamaan regresi linear berganda berbentuk seperti ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 \cdot X_2 + \beta_5 X_1 \cdot X_3$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak

α : Konstanta regresi

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi

X_1 : Koneksi Politik

X_2 : Kepemilikan Institusional (KI)

X_3 : Kepemilikan Manajerial (KM)

$X_1 \cdot X_2$: Koneksi Politik x Kepemilikan Institusional (KPxKI)

$X_1 \cdot X_3$: Koneksi Politik x Kepemilikan Manajerial (KPxKM)

3.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan sebuah model regresi. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Dalam menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5 persen dengan derajat kebebasan (df) pembilang adalah k-1, dan df penyebut adalah n-k, dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah sampel. Syarat pengambilan keputusan pada uji F yaitu:

- Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima,
- Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Adapun syarat pengambilan keputusan yang lain dengan melihat nilai signifikansi pada tabel, yaitu:

- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan telah sesuai atau layak digunakan.
- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan tidak sesuai atau tidak dapat digunakan.

3.5.3 Uji Koefisien Determinan

Koefisien Determinan adalah faktor yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat yang datang dari variabel bebas sebesar kuadrat dari koefisien korelasinya. Uji Koefisien Determinan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya R kuadrat antara angka 0 sampai 1. Jika nilai determinan mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa nilai determinan dinilai baik.

3.5.4 Uji T

Uji t ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial atau secara individu (masing-masing) terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lainnya konstan atau tetap. Uji t ini dilakukan dengan melihat hasil t-hitung atau nilai signifikansi (sig.) yang ada di tabel *output* SPSS, dan membandingkannya dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Syarat pengambilan keputusannya yaitu:

- H_0 : diterima, jika nilai t-hitung (sig) < α , maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh secara parsial yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- H_0 : ditolak, jika nilai t-hitung (sig) > α , maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.



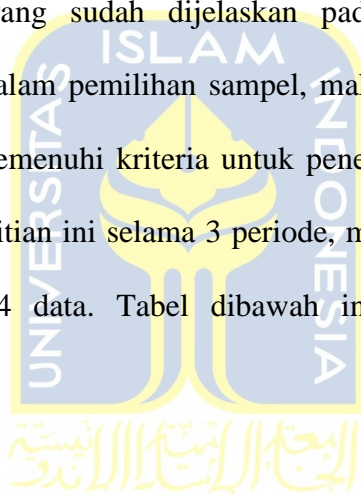
BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil analisis data dan penelitian tentang pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setelah dilakukannya seleksi dalam pemilihan sampel, maka diperoleh sampel sejumlah 58 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 3 periode, maka dari itu jumlah data pada penelitian ini ada 174 data. Tabel dibawah ini merupakan kriteria dalam pengambilan sampel:



Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Berdasarkan Metode *purposive sampling*

No.	Kriteria Sampel Penelitian	Jumlah
1.	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2018	164
2	Perusahaan Manufaktur yang mengalami kerugian fiskal selama tahun 2016 - 2018, karena perusahaan yang mengalami kerugian fiskal tidak diwajibkan membayar pajak sehingga tidak relevan dengan penelitian.	(86)
3	Perusahaan Manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah.	(16)
4	Perusahaan Manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara terus menerus yang telah diaudit.	(5)

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian	57
Total sampel perusahaan selama 3 tahun	171

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini untuk memberikan gambaran data mencakup nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran pajak	171	0.0001	0.5809	0.246950	0.1000262
Koneksi Politik	171	0.00	1.00	0.0702	0.25619
Kepemilikan Institusional	171	1.23	99.34	73.8550	24.65998
Kepemilikan Manajerial	171	.00	38.02	4.4755	9.18097
Valid N (listwise)	171				

Sumber: Data *Output SPSS 23*

Berdasarkan tabel hasil analisis statistik deskriptif tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut:

- Pada variabel penghindaran pajak yang diuji dengan analisis statistik deskriptif, didapatkan hasil yaitu nilai minimum sebesar 0.0001 pada PT

Roda Vivatex Tbk pada tahun 2016, nilai maksimum sebesar 0.5809 pada PT Argha Karya Prima Industry Tbk pada tahun 2017, nilai rata-rata sebesar 0.24695 dan standar deviasi sebesar 0.1000262.

- Pada variabel koneksi politik yang diuji dengan analisis statistik deskriptif, didapatkan hasil yaitu nilai minimum sebesar 0 untuk perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki pemerintah, dan nilai maksimum sebesar 1 untuk perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan, dengan kata lain perusahaan tersebut terkoneksi politik. Nilai rata-rata sebesar 0.0702 dan standar deviasi sebesar 0.25619
- Pada variabel kepemilikan institusional yang diuji dengan analisis statistik deskriptif, didapatkan hasil yaitu nilai minimum sebesar 1.23 pada PT Chitose Internasional Tbk, nilai maksimum sebesar 99.34, nilai rata-rata sebesar 73.855, dan standar deviasi sebesar 24.65998.
- Pada variabel kepemilikan manajerial yang diuji dengan analisis statistik deskriptif, didapatkan hasil yaitu nilai minimum sebesar 0.00 pada beberapa perusahaan yang tidak menjual sahamnya kepada pihak manajemen, nilai maksimum sebesar 38.02 pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2018, nilai rata-rata sebesar 4.475, dan standar deviasi sebesar 9.18097

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Pengujian asumsi klasik pertama yang dilakukan adalah uji Normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan distribusi dalam model regresi pada variabel residual. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan model *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test*. Syarat pengambilan keputusan uji normalitas pada penelitian ini dengan melihat angka pada baris *Asymp.sig. (2-tailed)*, dengan syarat angka signifikansi harus lebih besar daripada 0,05. Jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

Asym. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,000	Tidak Terdistribusi Normal

Sumber: Data Output SPSS 23

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas, didapatkan angka signifikansi sebesar 0,000, yang mana angka tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Penyimpangan asumsi klasik autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Metode pengujian autokorelasi

yang umum digunakan adalah pengujian Durbin Watson (DW). Adapun beberapa syarat pengambilan keputusan pada pengujian ini:

- Jika angka DW dibawah -2, maka terdapat autokorelasi positif.
- Jika angka DW berada diantara angka -2 sampai 2, maka tidak terdapat autokorelasi.
- Jika angka DW diatas 2, maka terdapat autokorelasi negatif.

Tabel dibawah ini adalah hasil pengujian Durbin Watson untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Adjusted R Square	Durbin-Watson
0.017	1.221

Sumber: Data Output SPSS 23

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan angka *Adjusted R-Square* sebesar 0.017 yang mana dapat diartikan bahwa 1,7% persen variasi variabel terkait yaitu penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen yaitu koneksi politik, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan sisanya, dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Kemudian didapatkan hasil pengujian autokorelasi dengan angka DW sebesar 1,221. Karena angka tersebut berada diantara -2 sampai 2, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian asumsi klasik yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam pengujian ini, dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih besar sama dengan 10 atau nilai *tolerance* lebih kecil sama dengan 0.10, maka model regresi tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Statistik Multikolinearitas		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Koneksi Politik	0.973	1.028	Tidak terjadi gejala Multikolinearitas
Kepemilikan Institusional	0.718	1.392	Tidak terjadi gejala Multikolinearitas
Kepemilikan Manajerial	0.722	1.384	Tidak terjadi gejala Multikolinearitas

Sumber: Data Output SPSS 23

Berdasarkan tabel hasil pengujian multikolinearitas di atas, didapatkan angka *tolerance* pada seluruh variabel lebih besar dari 0.10, dan semua angka VIF pada variabel juga lebih kecil dari 10.00, yang mana dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi klasik yang terakhir pada penelitian ini adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* dari nilai residual pada suatu proses pengamatan ke

pengamatan lain. Salah satu syarat untuk model regresi yang baik adalah tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau model regresi tersebut bersifat homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan Uji Glejser, dengan pengambilan keputusan yang dapat dilihat pada kolom signifikansi (sig.). Jika angka signifikansi lebih besar daripada 0.05, maka variabel tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Koneksi Politik	0.268	Tidak terjadi Gejala heteroskedastisitas
Kepemilikan Institusional	0.268	Tidak terjadi Gejala heteroskedastisitas
Kepemilikan Manajerial	0.055	Tidak terjadi Gejala heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel hasil pengujian heteroskedastisitas diatas, didapatkan bahwa angka signifikansi (sig.) pada seluruh variabel lebih besar daripada 0.05, yang artinya memenuhi syarat bahwa model regresi tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.4. Uji Analisis Regresi Berganda

Uji analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel independen, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Hasil pengujian ini sudah dituangkan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T Hitung	Sig. T
Koneksi Politik	-0.131	-0.572	0.568
Kepemilikan Institusional	-0.001	-2.408	0.017
Kepemilikan Manajerial	-0.001	-1.436	0.153
KP x KI	-0.001	0.581	0.562
KP x KM	-0.272	-0.702	0.484
Variabel Dependen: Penghindaran Pajak			
Konstanta: 0,320			
Std Error: 0,31			

Dilihat dari tabel hasil pengujian analisis regresi linear berganda diatas, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$PP = 0.320 - 0.131 KP - 0.001 KI - 0.001 KM + 0.001 KP.KI - 0.272 KP.KM$$

Dari persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 0.320 artinya yaitu apabila variabel keseluruhan dianggap konstan atau sama dengan 0, maka nilai penghindaran pajak akan bernilai sebesar konstanta.
- Pada variabel koneksi politik didapatkan koefisien regresi sebesar -0.131, yang artinya jika variabel koneksi politik meningkat sebesar 1 satuan,

maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar -0.131 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.

- Pada variabel kepemilikan institusional didapatkan koefisien regresi sebesar -0.001 , yang artinya jika variabel kepemilikan institusi meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar -0.001 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Pada variabel kepemilikan manajerial didapatkan koefisien regresi sebesar -0.001 , yang artinya jika variabel kepemilikan manajerial meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar -0.001 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Pada variabel kepemilikan institusional memoderasi koneksi politik didapatkan koefisien regresi sebesar 0.001 , yang artinya jika variabel kepemilikan institusi meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0.001 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Pada variabel kepemilikan manajerial memoderasi koneksi politik didapatkan koefisien regresi sebesar -0.272 , yang artinya jika variabel kepemilikan manajerial meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar -0.272 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya dalam kondisi konstan

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan sebuah model regresi. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Pengambilan keputusan pada pengujian ini dapat dilihat pada kolom signifikansi (sig.). Jika angka signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian layak untuk digunakan, dan sebaliknya.

Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji F

Signifikansi Uji F	0.237
---------------------------	--------------

Berdasarkan hasil tabel perhitungan di atas, angka signifikansi menunjukkan hasil sebesar 0.237. Karena angka tersebut lebih besar daripada 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak dapat digunakan. Akan tetapi, dengan segala keterbatasannya, model regresi dalam penelitian ini akan tetap digunakan guna menyelesaikan penelitian tugas akhir.

4.5.2 Uji t

Uji t pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen (koneksi politik, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), variabel moderasi (kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Pengambilan keputusan pada pengujian ini dapat dilihat pada kolom signifikansi (sig.). Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Variabel Independen	Koefisien Regresi	Sig. T
Koneksi Politik	-0.131	0.568
Kepemilikan Institusional	-0.001	0.017
Kepemilikan Manajerial	-0.001	0.153
KP x KI	-0.001	0.562
KP x KM	-0.272	0.484
Variabel Dependen: Penghindaran Pajak		
Konstanta: 0,320		
Std Error: 0,31		

Dari tabel hasil uji t diatas, dapat disimpulkan:

- Nilai signifikansi pada variabel Koneksi Politik adalah 0.568 dan nilai B sebesar -0.131. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Koneksi Politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Maka dari itu, hipotesis pertama tidak didukung.
- Nilai signifikansi pada variabel Kepemilikan Institusional adalah 0.017 dan nilai B sebesar -0.001. Karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dengan arah berpengaruh negatif. Maka dari itu, hipotesis kedua didukung..

- Nilai signifikansi pada variabel Kepemilikan Manajerial adalah 0.153 dan nilai B sebesar -0.001. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Maka dari itu, hipotesis Ketiga tidak didukung.
- Nilai signifikansi pada variabel Kepemilikan Institusional memoderasi hubungan Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak adalah 0.562 dan nilai B sebesar 0.001. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Penghindaran pajak. Maka dari itu, hipotesis keempat tidak didukung.
- Nilai signifikansi pada variabel variabel Kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak adalah 0.484 dan nilai B sebesar -0.272. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial tidak dapat memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Penghindaran pajak. Maka dari itu, hipotesis kelima tidak didukung.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini membuktikan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar atau kecilnya kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah pada sebuah perusahaan, tidak akan memberikan

pengaruh kecenderungan sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau juga ketaatan pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadila (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena proses politik mengenai perpajakan, tidak diterapkan dalam bentuk aturan yang memberikan kompensasi pajak secara langsung, sehingga perusahaan yang terkoneksi politik tidak memiliki tarif pajak efektif lebih rendah.

4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besarnya kepemilikan saham oleh institusi akan mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menghindari kegiatan agresivitas pajak, dan membuat perusahaan akan lebih menaati peraturan yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2019) dan Charisma & Dwimulyani (2019) yang juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika semakin besarnya kepemilikan saham secara institusional, maka institusi yang menanamkan sahamnya akan ikut andil dalam mengawasi operasional dan seluruh kegiatan perusahaan yang mereka investasikan, agar mereka dapat memastikan bahwa investasinya itu aman dan terkendali.

4.6.3 Pengaruh kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Seberapapun besar kepemilikan saham oleh eksekutif perusahaan tersebut, tidak akan membuat perusahaan itu ingin melakukan penghindaran pajak atau sebaliknya. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A. A. Putri & Lawita (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana ketika eksekutif perusahaan memiliki saham di perusahaannya, maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak, agar keuntungan yang didapatkan oleh eksekutif perusahaan semakin besar.

4.6.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin bertambahnya kepemilikan saham oleh institusi tidak akan mempengaruhi keinginan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna R. Putri (2018) yang menyebutkan bahwa GCG yang diprosikan menjadi kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional mempresentasikan besarnya kepemilikan saham oleh institusi. Institusi yang menanamkan sahamnya mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan, dikarenakan institusi sebagai pemegang saham juga menginginkan

bonus dari kinerja operasional perusahaan. Maka dari itu, keberadaan institusi ini akan lebih fokus pada laba perusahaan yang sangat berkaitan dengan manajemen laba, dan tidak memperhatikan kebijakan perencanaan pajak perusahaan.

4.6.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial juga tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak, seperti halnya kepemilikan institusional. Jika mengacu pada penelitian milik Putri (2018) yang menyatakan bahwa keberadaan institusi sebagai pemegang saham akan berkaitan langsung dengan manajemen laba karena institusi akan berfokus pada kinerja perusahaan, dapat mempresentasikan bahwa keberadaan pihak eksekutif yang menanamkan sahamnya juga akan lebih fokus untuk meningkatkan laba perusahaan yang mana akan berkaitan langsung dengan manajemen laba, bukan pada kebijakan perpajakan perusahaan. Maka dari itu, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh koneksi politik dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Analisis data digunakan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS v23. Data sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- A. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah dengan minimal kepemilikan 20%, tidak menjadikan perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak atau sebaliknya.
- B. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin kecil juga kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.
- C. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar atau kecilnya kepemilikan saham oleh eksekutif perusahaan, tidak akan mempengaruhi keinginan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
- D. Kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Keberadaan institusi dalam kepemilikan saham perusahaan tidak akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.

- E. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Besar atau kecilnya kepemilikan saham oleh pihak eksekutif perusahaan dalam kepemilikan saham perusahaan tidak akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak atau sebaliknya.

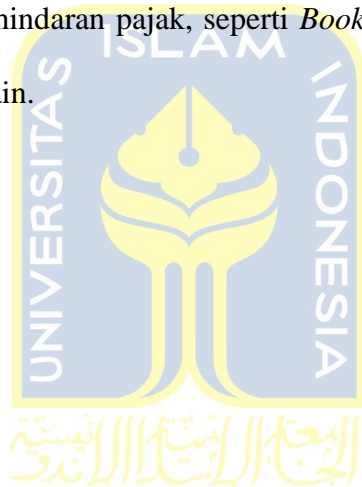
5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum menghasilkan kesimpulan yang sempurna, hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitiannya, diantaranya:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sektor perusahaan manufaktur sebagai sampel, sehingga sampel penelitian hanya sedikit.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan variabel *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
- c. Penelitian ini hanya menggunakan *Effective Tax Rate* untuk variabel penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- d. Data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal seperti yang ditunjukkan pada hasil uji normalitas.
- e. Uji F pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan regresi tidak layak digunakan.

5.3 Saran Penelitian

- a. Disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas pengambilan sampel perusahaan dan dapat memperpanjang periode sampel penelitiannya.
- b. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan elemen *corporate governance* yang lain seperti kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, atau jumlah rapat umum pemegang saham.
- c. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur penghindaran pajak, seperti *Book Tax Gap*, *Cash Effective Tax Rate*, dan lain-lain.



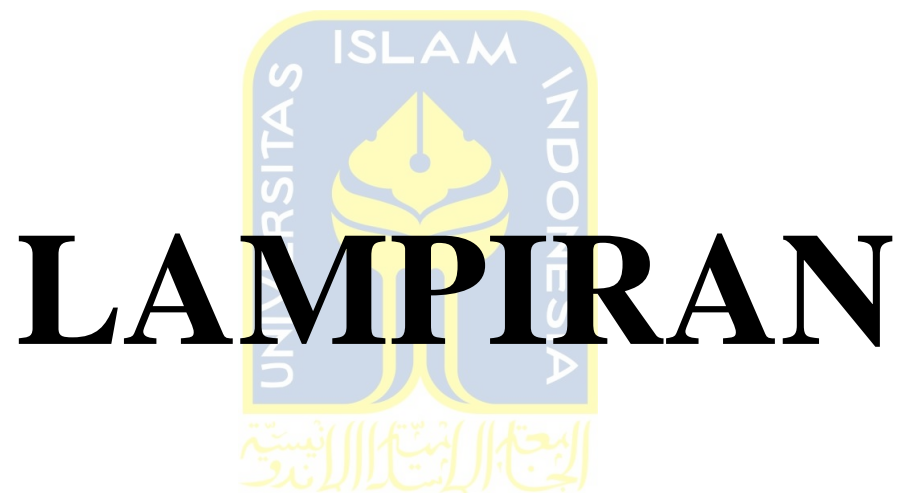
DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2017). *Pengaruh ROA, Leverage, Ukuran perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak*. 4(2), 107–117.
- Asadine, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–10.
- Christiawan, Y. J., & Tarigan, J. (2007). Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.9744/jak.9.1.pp.1-8>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Darmayanti, P. P. B., & Lely Aryani Merkusyawati, N. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 50–67.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 15, 584–613.
- Dini, F. M. (2019). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. 53(9), 287. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Forum Pajak. (2016). *IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak*. [forumpajak.org](https://forumpajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/). <https://forumpajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/>

- Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Jurnal Ilmiah Universitas Pandanaran*.
<https://doi.org/10.1177/107049659800700202>
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 1–12.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Hariyanto, F., & Utomo, D. C. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–14.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141–152.
- Indira Yuni, N. P. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p09>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jian, M., Li, W., & Zhang, H. (2012). How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China. In *School of Accountancy: Singapore Management University*.
- Kusumayani, H. A., & Suardana, K. A. (2017). Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 646–673.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. . A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 2028–2054.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52.

- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. . W. E. (2014). Pengaruh Karakteristik perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 66, 37–39.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Pebrianto, F., & Tri, R. (2020). *Faisal Basri: Tax Ratio 2019 Terendah dalam 50 Tahun Terakhir*. Bisnis.Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1307543/faisal-basri-tax-ratio-2019-terendah-dalam-50-tahun-terakhir#:~:text=TEMPO.CO%2C> Jakarta - Ekonom,Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
- Pramudito, B. W., & Ratna Sari, M. M. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 737–752.
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Seminar Nasional*, 2(2), 344–359.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 69–75.
- Putri, K. E., Sohib, & Yahdi, M. (2019). Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Leverage , Return on Asset , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Dagang Besar Yang Terdaftar. *E-Proceeding of Management*, 2(July), 133–145.
- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 4(1), 20–28. <http://journal.ibs.ac.id/index.php/JEMP/article/view/119>

- Raymond Fisman. (2001). Estimating the value of political connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/aer.91.4.1095>
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 175–193.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 2202–2230.
- Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283>
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik , Capital Intensity , Profitabilitas , Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1980–2008.
- Yunistina, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9610>



LAMPIRAN 1

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016 – 2018

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham
1.	PT Akasha Wira International Tbk	ADES
2.	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
3.	PT Akr Corporindo Tbk	AKRA
4.	PT Alkindo Naratama Tbk	ALDO
5.	PT Astra International Tbk	ASII
6.	PT Astra Otoparts Tbk.	AUTO
7.	PT Budi Starch & Sweetener Tbk.	BUDI
8.	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA
9.	PT Colorpak Indonesia Tbk.	CLPI
10.	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA
11.	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA
12.	PT Duta Pertiwi Tbk	DUTI
13.	PT Ekadharna International Tbk	EKAD
14.	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
15.	PT Fast Food Indonesia Tbk	FAST
16.	PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	ICBP
17.	PT Intanwijaya Internasional Tbk	INCI
18.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
19.	PT Indospring Tbk	INDS
20.	PT Kabelindo Murni Tbk	KBLM
21.	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	KDSI
22.	PT Lion Metal Works Tbk	LION
23.	PT Lionmesh Prima Tbk	LMSH
24.	PT Lautan Luas Tbk	LTLS
25.	PT Pakuwon Jati Tbk	PWON
26.	PT Roda Vivatex Tbk	RDTX
27.	PT Summarecon Agung Tbk	SMRA
28.	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN
29.	PT Siantar Top Tbk	STTP
30.	PT Tunas Ridean Tbk	TURI
31.	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM
32.	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	SCCO

33.	PT Tunas Baru Lampung Tbk.	TBLA
34.	PT Semen Indonesia	SMGR
35.	PT Kimia Farma	KAEF
36.	PT Wijaya Beton	WTON
37.	PT Ultrajaya Milk Industry	ULTJ
38.	PT Unilever Indonesia	UNVR
39.	PT Japfa Comfeed Indonesia	JPFA
40.	PT Surya Toto Indonesia	TOTO
41.	PT Mayora Indah	MYOR
42.	PT Multibintang Indonesia	MLBI
43.	PT Asahimas Flat Glass	AMFG
44.	PT Pelangi Indah Canindo	PICO
45.	PT Selamat Sempurna	SMSM
46.	PT Sepatu Bata	BATA
47.	PT Primarindo Asia Infrastructure	BIMA
48.	Jembo Cable Company	JECC
49.	PT Ricky Putra Globalindo	RICY
50.	PT Trisula International	TRIS
51.	PT Nusantara Inti Corpora	UNIT
52.	PT Hanjaya Mandala Sampoerna	HMSP
53.	PT Kalbe Farma	KLBF
54.	PT Nippon Indosari Corpindo	ROTI
55.	PT Suparma	SPMA
56.	PT Kino Indonesia Tbk	KINO
57.	PT Chitose Internasional Tbk	CINT

LAMPIRAN 2

DATA PENELITIAN SAMPEL PERUSAHAAN

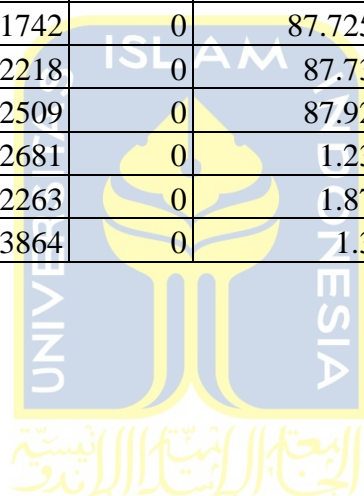
Perusahaan	Tahun	<i>Effective Tax Rate</i>	Koneksi Politik	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial	KP x KI	KP x KM
ADES	2016	0.0922	0	91.52	0	0	0
	2017	0.2516	0	91.52	0	0	0
	2018	0.2441	0	91.52	0	0	0
AKPI	2016	0.3102	0	34.1	0	0	0
	2017	0.5809	0	63.73	5.07	0	0
	2018	0.2995	0	77.99	22.93	0	0
AKRA	2016	0.0796	0	58.47	0.07	0	0
	2017	0.1082	0	58.58	0.076	0	0
	2018	0.2548	0	58.51	0.67	0	0
ALDO	2016	0.2546	0	58.41	14.32	0	0
	2017	0.2482	0	58.41	14.32	0	0
	2018	0.2570	0	58.41	19.22	0	0
ASII	2016	0.1776	0	50.11	0.04	0	0
	2017	0.2065	0	50.11	0.05	0	0
	2018	0.2181	0	97.53	0.04	0	0
AUTO	2016	0.2550	0	80	0	0	0
	2017	0.2306	0	80	0	0	0
	2018	0.2098	0	80	0	0	0
BUDI	2016	0.2689	0	90.64	0	0	0
	2017	0.2512	0	90.64	0	0	0
	2018	0.2969	0	90.64	0	0	0
CEKA	2016	0.1264	0	92.01	0.76	0	0
	2017	0.2498	0	92.01	0.76	0	0
	2018	0.2492	0	92.01	0.76	0	0
CLPI	2016	0.2570	0	66.58	6.7	0	0
	2017	0.2214	0	58.43	6.65	0	0
	2018	0.0255	0	62.93	0.07	0	0
DLTA	2016	0.2218	1	70.38	0	70.38	0
	2017	0.2418	1	70.38	0	70.38	0
	2018	0.2337	1	70.38	0	70.38	0
DVLA	2016	0.2907	0	92.46	0	0	0
	2017	0.2826	0	92.46	0	0	0
	2018	0.2646	0	93.74	0	0	0
DUTI	2016	0.0044	0	99	0	0	0
	2017	0.0067	0	99	0	0	0

	2018	0.0058	0	99	0	0	0
EKAD	2016	0.2344	0	76.32	0	0	0
	2017	0.2577	0	76.81	0	0	0
	2018	0.2702	0	82.2	0	0	0
GGRM	2016	0.2529	0	97.5	0.67	0	0
	2017	0.2569	0	97.5	0.67	0	0
	2018	0.2563	0	97.5	0.67	0	0
FAST	2016	0.2375	0	89.82	0	0	0
	2017	0.0138	0	79.68	0	0	0
	2018	0.2403	0	98.63	0	0	0
ICBP	2016	0.2722	0	80.53	0	0	0
	2017	0.3195	0	80.53	0	0	0
	2018	0.2773	0	80.53	0	0	0
INCI	2016	0.2487	0	2.17	33.61	0	0
	2017	0.2502	0	2.17	33.61	0	0
	2018	0.2434	0	2.17	33.61	0	0
INDF	2016	0.3430	0	50.07	0.02	0	0
	2017	0.3289	0	50.07	0.02	0	0
	2018	0.3337	0	50.07	0.01	0	0
INDS	2016	0.1760	0	88.11	0.44	0	0
	2017	0.2913	0	88.11	0.44	0	0
	2018	0.2520	0	90.31	0.44	0	0
KBLM	2016	0.3847	0	79.88	8.93	0	0
	2017	0.0124	0	79.16	8.93	0	0
	2018	0.3695	0	79.43	8.93	0	0
KDSI	2016	0.2602	0	75.68	5.39	0	0
	2017	0.2613	0	78.44	5.5	0	0
	2018	0.2616	0	79.47	9.91	0	0
LION	2016	0.2255	0	57	0.24	0	0
	2017	0.5399	0	57	0.24	0	0
	2018	0.3860	0	42.3	0.15	0	0
LMSH	2016	0.3365	0	32.22	23.7	0	0
	2017	0.2585	0	32.22	20.64	0	0
	2018	0.4255	0	38.75	20.64	0	0
LTLS	2016	0.2023	0	53.44	2.78	0	0
	2017	0.2794	0	55.11	3.16	0	0
	2018	0.2434	0	77.79	4.57	0	0
PWON	2016	0.0280	0	56.13	0.02	0	0
	2017	0.0227	0	69.74	0.02	0	0

	2018	0.0094	0	99.34	0.02	0	0
RDTX	2016	0.0001	0	74.99	2.67	0	0
	2017	0.0008	0	74.99	2.5	0	0
	2018	0.0016	0	75.07	2.43	0	0
SMRA	2016	0.3105	0	37.64	0.14	0	0
	2017	0.3334	0	45.73	0.62	0	0
	2018	0.2733	0	46.89	0.61	0	0
SRSN	2016	0.0810	0	68.01	22.05	0	0
	2017	0.0670	0	32.28	34.51	0	0
	2018	0.2382	0	42.46	28.97	0	0
STTP	2016	0.2001	0	56.76	3.19	0	0
	2017	0.2513	0	56.76	3.19	0	0
	2018	0.2144	0	56.76	3.27	0	0
TURI	2016	0.2018	0	87.31	0	0	0
	2017	0.1973	0	87.05	0	0	0
	2018	0.1830	0	87.05	0	0	0
WIIM	2016	0.2223	0	27.62	24.84	0	0
	2017	0.2551	0	5.14	38	0	0
	2018	0.2769	0	5.52	38.02	0	0
SCCO	2016	0.2252	0	71.15	4.78	0	0
	2017	0.2187	0	71.15	4.78	0	0
	2018	0.2595	0	83.9	4.78	0	0
TBLA	2016	0.2264	0	51.25	0.08	0	0
	2017	0.2322	0	54.35	0.08	0	0
	2018	0.2672	0	55.27	0.08	0	0
SMGR	2016	0.1081	1	98.007	0.002	98.007	0.002
	2017	0.2679	1	98.007	0.002	98.007	0.002
	2018	0.2483	1	99.013	0	99.013	0
KAEF	2016	0.2909	1	96.508	0	96.508	0
	2017	0.2624	1	96.977	0.0007	96.977	0.0007
	2018	0.3045	1	97.36	0.0013	97.36	0.0013
WTON	2016	0.1722	1	80.59	0.16	80.59	0.16
	2017	0.1884	1	82.07	0.18	82.07	0.18
	2018	0.2141	1	89.74	0.18	89.74	0.18
ULTJ	2016	0.2388	0	98.89	0	0	0
	2017	0.3060	0	99.02	0	0	0
	2018	0.2607	0	98.85	0	0	0
UNVR	2016	0.2545	0	53.13	34.51	0	0
	2017	0.2526	0	50.93	33.85	0	0

	2018	0.2525	0	74.22	11.49	0	0
JPFA	2016	0.2151	0	62.98	1.07	0	0
	2017	0.3900	0	80.06	1.52	0	0
	2018	0.2708	0	64.09	1.43	0	0
TOTO	2016	0.3293	0	92.4	0	0	0
	2017	0.2614	0	92.4	0	0	0
	2018	0.2330	0	92.4	0	0	0
MYOR	2016	0.2476	0	74.03	25.22	0	0
	2017	0.2542	0	74.05	25.22	0	0
	2018	0.2609	0	73.99	25.22	0	0
MLBI	2016	0.2561	0	97.41	0	0	0
	2017	0.2573	0	98.07	0	0	0
	2018	0.2674	0	98.32	0	0	0
AMFG	2016	0.2530	0	97.24	0	0	0
	2017	0.3935	0	93.76	0	0	0
	2018	0.4102	0	45.46	0	0	0
PICO	2016	0.2044	0	96.61	0.04	0	0
	2017	0.1072	0	96.92	0	0	0
	2018	0.1164	0	96.92	0	0	0
SMSM	2016	0.2370	0	83.87	7.989	0	0
	2017	0.2293	0	83.672	8.65	0	0
	2018	0.2351	0	83.57	8.65	0	0
BATA	2016	0.3533	0	96.21	0	0	0
	2017	0.3253	0	96.16	0	0	0
	2018	0.2684	0	96.15	0	0	0
BIMA	2016	0.4171	0	92.7	0	0	0
	2017	0.4489	0	92.5	0	0	0
	2018	0.2608	0	86.57	0	0	0
JECC	2016	0.2451	0	90.15	0	0	0
	2017	0.2532	0	90.15	2.43	0	0
	2018	0.2755	0	90.15	2.46	0	0
RICY	2016	0.3993	0	51.69	0	0	0
	2017	0.3584	0	51.68	0	0	0
	2018	0.3807	0	51.69	0	0	0
TRIS	2016	0.4741	0	76.08	0.7	0	0
	2017	0.3497	0	89.95	0.7	0	0
	2018	0.1909	0	89.68	0.7	0	0
UNIT	2016	0.5509	0	54.79	0	0	0
	2017	0.3105	0	61.33	0	0	0

	2018	0.3289	0	29.4	0	0	0
HMSP	2016	0.2498	0	98.87	0	0	0
	2017	0.2500	0	98.8	0	0	0
	2018	0.2462	0	98.8	0	0	0
KLBF	2016	0.2395	0	97.85	0.01	0	0
	2017	0.2431	0	96.77	0.01	0	0
	2018	0.2561	0	94.33	0.08	0	0
ROTI	2016	0.2427	0	99.1	0	0	0
	2017	0.2728	0	98.98	0	0	0
	2018	0.3197	0	99.34	0	0	0
SPMA	2016	0.2721	0	93.21	0	0	0
	2017	0.2393	0	93.19	0	0	0
	2018	0.2502	0	93.02	0	0	0
KINO	2016	0.1742	0	87.725	10.58	0	0
	2017	0.2218	0	87.73	10.6	0	0
	2018	0.2509	0	87.92	10.75	0	0
CINT	2016	0.2681	0	1.23	0.30	0	0
	2017	0.2263	0	1.87	0.27	0	0
	2018	0.3864	0	1.3	0.26	0	0



LAMPIRAN 3

OUTPUT UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Penghindaran Pajak	171	.5808	.0001	.5809	.246950	.0076492	.1000262
Koneksi Politik	171	1.00	.00	1.00	.0702	.01959	.25619
Kepemilikan Institusional	171	98.11	1.23	99.34	73.8550	1.88580	24.65998
Kepemilikan Manajerial	171	38.02	.00	38.02	4.4755	.70209	9.18097
Valid N (listwise)	171						



LAMPIRAN 4

OUTPUT UJI ASUMSI KLASIK

- Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		171
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09829834
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.143
	Positive	.115
	Negative	-.143
Test Statistic		.143
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

- Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.185 ^a	.034	.017	.0991773	1.221

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

- Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.317	.030		10.478	.000		

Koneksi Politik	-.013	.030	-.033	-.425	.672	.973	1.028
Kepemilikan Institusional	-.001	.000	-.210	-2.340	.020	.718	1.392
Kepemilikan Manajerial	-.001	.001	-.125	-1.393	.165	.722	1.384

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

- Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.095	.022		4.304	.000		
Koneksi Politik	-.024	.022	-.086	1.110	.268	.973	1.028
Kepemilikan Institusional	.000	.000	-.100	1.112	.268	.718	1.392
Kepemilikan Manajerial	-.001	.001	-.174	1.934	.055	.722	1.384

a. Dependent Variable: AbsRES

LAMPIRAN 5

OUTPUT ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.320	.031		10.440	.000
	Koneksi Politik	-.131	.228	-.334	-.572	.568
	Kepemilikan Institusional	-.001	.000	-.219	-2.408	.017
	Kepemilikan Manajerial	-.001	.001	-.129	-1.436	.153
	KPxKI	.001	.003	.336	.581	.562
	KPxKM	-.272	.388	-.062	-.702	.484

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak



LAMPIRAN 6

OUTPUT UJI HIPOTESIS

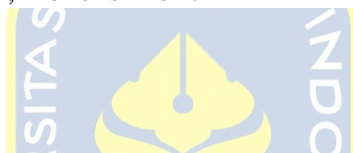
- Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.068	5	.014	1.373	.237 ^b
	Residual	1.633	165	.010		
	Total	1.701	170			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), KP_xKM, Kepemilikan Institusional, KP_xKI, Kepemilikan Manajerial, Koneksi Politik



- Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.320	.031		10.440	.000
	Koneksi Politik	-.131	.228	-.334	-.572	.568
	Kepemilikan Institusional	-.001	.000	-.219	-2.408	.017
	Kepemilikan Manajerial	-.001	.001	-.129	-1.436	.153
	KP _x KI	.001	.003	.336	.581	.562
	KP _x KM	-.272	.388	-.062	-.702	.484

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak